

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2013-2018

Nico Satria¹, Rumzi Samin², Ramadhani Setiawan³

Email : nicoosatria27@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Abstract

The poverty alleviation Program is an effort made by the local government in the form of providing assistance and or guidance to overcome, mitigate and or reduce/decrease the poverty rate. If seen the number of poor people go up and down, but the government of Tanjungpinang has already compiled many programs. But the fenomena that occurs is the level of poverty in the city of Tanjungpinang still high. The purpose of this research is to evaluate the human development policy on poverty alleviation Program in Tanjungpinang City period 2013-2018. The data analysis techniques used are qualitative descriptive. This research uses interview techniques, observations, and documentation. Based on the results of the research, it can be concluded that the human development policy on the poverty alleviation Program in Tanjungpinang City period 2013-2018 runs accordingly, this can be seen from the increase in the Human development index number in the city of Tanjungpinang and the decline in poverty rate in the city of Tanjungpinang although insignificant this is because there are still poor people who have not felt or directly get a poverty alleviation Program, this is obtained from the observation is an error in logging, inaccurate data, then the data in the get is not updated.

Keywords: Human development Index, poverty

I. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis (Suryono, 2001:62). Sejalan dengan Suryono, Soetomo (2008:8) masyarakat dalam proses pembangunan bukan hanya mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran. Dalam proses pembangunan masyarakat tidak diberlakukan semata-mata sebagai objek, tetapi lebih ke subjek dan aktor atau pelaku. Pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan seseorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan (Suhandojo, 2002:165).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah. Indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup, berpengetahuan dan berketerampilan yang

diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. (BPS, 2015:4)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menjelaskan Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan seseorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan (Suhandojo, 2002:165). Perbaikan taraf hidup, pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan manusia, disebabkan dengan tingginya tingkat pengetahuan / pendidikan akan mendongkrak kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan manusia dan membantu meningkatkan produktivitas masyarakat. IPM dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program pembangunan di setiap daerah, meskipun belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, IPM diyakini satu-satunya indikator yang dapat mengukur kualitas dari proses pembangunan manusia.

Salah satu program pembangunan manusia adalah program pengentasan kemiskinan salah satunya adalah program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat.

Dalam rangka meningkatkan IPM, maka dirancanglah suatu program yang khusus yakni Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah “suatu program dengan tersentuhnya rumah tangga sangat miskin dari program kesehatan dan pendidikan bagi anak balita, ibu hamil dan usia pendidikan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia yang akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin” (Satuan Kerja Perangkat Daerah, 2013:4).

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah, dapat kita lihat IPM Kepulauan Riau dari tahun 2013-2018 terus mengalami peningkatan. Kualitas SDM menjadi semakin baik dengan ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (Rachmat, 2013:18). Hasil dari Indeks pembangunan manusia tiap masing-masing provinsi, bahkan dalam lingkup kota atau kabupaten juga mengalami perbedaan indeks pembangunan manusia, Misalnya saja di provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata IPM sebesar 73.91.

Perbandingan antara kota atau kabupaten tertinggi dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau cukup jauh, dimana kota Batam pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,54 sedangkan kota atau kabupaten dengan Indeks pembangunan manusia terendah di provinsi Kepulauan Riau diperoleh kabupaten Lingga pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,06. Bahkan jika dilihat dari Indeks Pembangunan tersebut kota Tanjungpinang masih tertinggal yaitu pada tahun 2018 berada di 78,33 persen.

Kondisi di Kepulauan Riau dimana pembangunan ekonomi mengalami peningkatan yang tinggi serta daya beli masyarakat meningkat hal ini belum mampu mengurangi masalah kemiskinan yang ada dan tingginya tingkat pengangguran di Kota Tanjungpinang selaku ibukota Provinsi Kepulauan Riau, tertinggi kedua setelah Kabupaten Lingga. Meski memperoleh IPM yang tinggi, Kepulauan Riau masih belum berhasil mengatasi masalah-masalah sosial seperti maraknya gelandangan, pengemis dan tingginya tingkat pengangguran. Jika dilihat dari 2 wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Lingga dengan tingkat kemiskinan 13.55 dan di susul dengan Kota Tanjungpinang 9.24. Tidak hanya itu di berbeda dengan Kota Tanjungpinang, di Kabupaten Lingga memang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau namun jika dilihat dari data yang di dapatkan keadaan kemiskinan masyarakat di Lingga semakin menurun.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Kota Tanjungpinang merumuskan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam Perda ini menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristik dan merupakan masalah yang harus diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia kemudian dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdata lewat kegiatan pendataan penduduk miskin desa dan atau kelurahan berdasarkan kriteria/indikator yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai data dasar dalam program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dengan Keputusan Walikota. Di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut menjelaskan bahwa Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Strategi penunjang biaya pendidikan
- b. Strategi penunjang biaya kesehatan
- c. Strategi penunjang biaya keterampilan
- d. Strategi penunjang biaya modal usaha ekonomi produktif (UEP)
- e. Strategi penunjang pembangunan infrastruktur perdesaan
- f. Strategi penunjang biaya bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan tidak layak huni
- g. Strategi penunjang efektifitas pemungutan dana oleh BAZIS (Badan amal, zakat, infaq, shadaqah)

Kota Tanjungpinang menjadi sorotan karena merupakan ibu kota Provinsi, tidak hanya itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dimana Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian bantuan dan atau bimbingan untuk mengatasi, menanggulangi dan atau mengurangi/menurunkan angka kemiskinan. Jika dilihat memang terlihat jumlah penduduk miskin naik dan turun, padahal pemerintah kota Tanjungpinang sudah menyusun banyak program. Berdasarkan Data Badan Pusta Statistik Kota Tanjungpinang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan sedangkan jika dilihat dari data diketahui ada penurunan IPM di Kota Tanjungpinang

Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengevaluasi Kebijakan Pembangunan Manusia Pada Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang Periode 2013-2018

II. Metode Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam mencegah kesalahan penelitian. Analisa data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan dan diberikan penjelasan dan kesimpulan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat logis dengan beberapa tahap berikut yaitu reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat halus dan siap pakai setelah dilakukan penyeleksian dengan membuang data yang tidak diperlukan. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dalam melihat hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami data yang diperoleh.

III. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Manusia Pada Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang Periode 2013-2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. (BPS : 2009) Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa Kebijakan Pembangunan Manusia Pada Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang Periode 2013-2018 ditemukan beberapahal yaitu Indeks pembangunan masyarakat di Kota Tanjungpinang menurun, padahal kebijakan dan program kemiskinan sudah dilakukan, salah satunya adalah adanya bantuan dari program pengentasan kemiskinan. Hal ini maka dapat dianalisa bahwa program yang ada yang sudah efektif dalam kebijakan pembangunan manusia pada program pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang periode 2013-2018 walaupun masih ada kekurangan saat di lapangan. data penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang tersusun dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Tanjungpinang. Jika dilihat dari data yang di dapatkan pada tahun 2019, ada 5 program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas Pemerintah daerah. Kegiatan atau program ini dijalankan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,

kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, untuk program penanggulangan serta pengentasan kemiskinan ini pihak pemerintah sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, mulai dari RT,RW kelurahan, TKPKD kemudian dinas atau organisasi perangkat daerah terkait. Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya lebih dulu.

Kemiskinan dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya (Abdulsyani,2002 : 190). Sedangkan kemiskinan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI) adalah kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan menyambungkan kehidupan yang bermatabat.optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan.

Berdasarkan jurnal Tri Wahyu R (2009) Beberapa ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu :

1. Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan
4. Tidak memiliki tempat tinggal
5. Tidak terpenuhinya standar gizi minimal

Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, sertaaneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos,2002:4).

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya *multidimensional*. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidak mampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 2000). Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: 136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.

Kemiskinan sumber daya ekonomi melihat fenomena kemiskinan dari sisi ketiadaan atau kelangkaan sumber daya ekonomi baik faktor-faktor produksi yang berupa modal, tanah, sumber daya manusia dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang

disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin. Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan. Ukuran lain kemiskinan dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

Masyarakat merespon kebijakan pengentasan kemiskinan sudah antusias, karena dianggap mampu memenuhi sebagian dari kebutuhannya, meringankan beban mereka, dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segala instansi terkait masih perlu meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan yang masih dalam kategori baik, agar dapat mencapai kategori sangat baik di waktu yang akan datang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara lebih mengoptimalkan segala program pengentasan kemiskinan, tidak hanya ditekankan pada pengentasan kemiskinan secara sektoral namun lebih mengena pada masyarakat itu sendiri. Kinerja dari masing-masing instansi dan koordinasi sangat diperlukan dan harus lebih ditingkatkan kemudian pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, bahkan ada kebijakan atau peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaannya, seperti Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Kota Tanjungpinang merumuskan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam perda ini menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristik dan merupakan masalah yang harus diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia kemudian dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan serta penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sumardjan (1997) membedakan 4 (empat) pola kemiskinan. Pertama, kemiskinan individual, yakni kemiskinan yang terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang oleh seseorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Kedua, kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang dilihat dengan membandingkan antara taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga atau rumah tangga di suatu komunitas. Ketiga, kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang disandang oleh suatu golongan yang "built in" atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat; dan keempat, kemiskinan budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Berdasarkan jurnal Nafiah Ariyani, dkk (2015) tentang Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty ditemukan bahwa Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor perbedaan antarprogram, ketepatan program dengan kebutuhan masyarakat sasaran, keakuratan data calon penerima program, biaya manajemen, mekanisme penentuan target, kepraktisan organisasi, koordinasi antarlembaga, keberadaan lembaga-lembaga publik serta jumlah penerima manfaat program adalah faktor-faktor yang berperan sebagai pengungkit status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Artinya jika di antara salah satu faktor-faktor ini dihilangkan maka akan berdampak pada status keberlanjutan program. Penelitian ini juga menunjukkan hasil evaluasi terhadap status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan menyatakan bahwa program-program berbasis zakat adalah program dengan status keberlanjutan terbaik. Kata kunci: program pengentasan kemiskinan, Rappoverty, status keberlanjutan, faktor pengungkit.

Di Kota Tanjungpinang sendiri penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan melihat pola kemiskinan, dimana kemiskinan di Kota Tanjungpinang adalah kemiskinan individual, yakni kemiskinan yang terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang oleh seseorang

individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan sehingga yang diperlukan adalah, bantuan seperti program keluarga harapan agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, sertra pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih mandiri. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan”. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan (2003:610) bahwa : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Penelitian ini mengacu pada pendapat Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan bahwa: Efektivitas : Berkenaan dengan apakah program/kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang tersebut dapat meningkatkan pembangunan manusia, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang untuk menghasilkan tingkat penurunan angka kemiskinan. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Perataan : Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang dapat memuaskan masyarakat. Ketepatan : suatu hasil pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

Menurut Jones dalam Santosa (2008:43) evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya. Dye dalam Parson (2008:547) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008 :185) berpendapat bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal lain diungkapkan Indiahono (2009:145) yang mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan yaitu aspek proses dan hasil. Menurut Winarno (2012:234) evaluasi kebijakan publik dipandang sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Sedangkan, Nugroho (2009:699) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut.

Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau ketidak

cocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi. Ayurestianti (2017) tentang Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) ditemukan bahwa program Conditional Cash Transfers (CTT) atau PKH memiliki signifikansi nyata dalam pemerataan pendidikan dan akses yang mudah pada layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Indikator penting dalam keberhasilan program ini, validitas data berjalan secara maksimal, sehingga tidak asal dalam menentukan peserta penerima bantuan. Bukti keterlibatan masyarakat (non-peserta) dalam program juga menjadi indikator keberhasilan, sehingga bisa saling mengawasi antara satu sama lain. Alhasil, peserta yang tidak memenuhi kewajiban seperti aturan dalam buku pedoman 2016, mereka akan mendapat punishment mulai dari peringatan, teguran hingga pembatalan program bantuan. Namun saya juga menemukan kelemahan yang cukup mengusik, yaitu penerima manfaat masih menganggap bahwa bantuan langsung tunai bersyarat ini hanya untuk keperluan sesaat, tidak berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Pada gilirannya, proses pengentasan kemiskinan hanya bersifat 'menambal luka' bukan mengobati hingga ke akar masalahnya (based needs). Abdurrazzak Naufal dan Yatri Indah Kusumastuti (2010) tentang Evaluasi Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) (Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat) ditemukan bahwa Dari penelitian ini, Disarankan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) IPB, Yayasan Damandiri, serta Pemerintah harus tangan di tangan untuk melanjutkan mendukung program pemberdayaan.

Dalam penelitian ini ditemukan sebagai berikut Efektivitas ditemukan bahwa program yang ada yang sudah efektif dalam kebijakan pembangunan manusia pada program pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang periode 2013-2018 walaupun masih ada kekurangan saat di lapangan, selama ini program yang ada sudah cukup efektif, dapat meningkatkan IPM Kota Tanjungpinang, namun memang tidak dapat langsung mengentaskan kemiskinan yang ada. Efisiensi ditemukan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan melalui 3 program dengan 12 kegiatan, itulah standar-standar yang diimplementasikan kota. Untuk membuktikan komitmen dan konsistensinya itu, makannya di bentuk oleh tim TKPKD. Kecukupan ditemukan bahwa program kemiskinan di kota Tanjungpinang sudah dapat memperbaiki angka pembangunan masyarakat di Kota Tanjungpinang, walapun tidak secara signifikan, namun hal ini cukup menunjukkan bahwa program yang ada sudah mampu di manfaatkan dengan baik. Meski begitu pemerintah saat ini kurang memperhatikan program pengentasan kemiskinan berupa pemberdayaan masyarakat, selama ini pemerintah hanya berfokus pada bantuan-bantuan tunai. Tidak untuk program pemberdayaan masyarakat lainnya seperti bantuan usaha, pelatihan wirausahaan untuk masyarakat miskin. Perataan ditemukan bahwa di pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala. Khususnya pada pendataan sehingga program banyak yang belum tepat sasaran, data yang tidak akurat, kemudian data yang di dapatkan tidak diperbaharui. Harusnya agar merata perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi mulai dari instansi terendah. Responsivitas ditemukan bahwa kebijakan pembangunan manusia pada program pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang periode 2013-2018 selama ini sudah di respon masyarakat dengan sangat baik, karena dianggap sudah cukup membantu kebutuhan masyarakatnya. Ketepatan ditemukan bahwa pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, bahkan ada kebijakan atau peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaannya, seperti Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Kota Tanjungpinang merumuskan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam perda ini menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi. Agus salim (2000:18) dalam bukunya "mereduksi kemiskinan" menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan absolut dan

kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005:5).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kebijakan Pembangunan Manusia khususnya dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang Periode 2013-2018 sudah mampu memberikan penurunan angka kemiskinan, namun begitu kemiskinan yang ada di Kota Tanjungpinang tidak menurun signifikan, banyak nya kesalahan di lapangan menjadi salah satu faktornya seperti yang sering terjadi adalah pendataan, program yang ada tidak serta merta dapat mengubah kehidupan masyarakat dan merubah tingginya angka IPM di Kota Tanjungpinang. Masih ada masyarakat miskin yang belum merasakan atau mendapatkan langsung program pengentasan kemiskinan, hal ini di dapatkan dari hasil observasi adalah adanya kesalahan di pendataan, data yang tidak akurat, kemudian data yang di dapatkan tidak diperbaharui.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Amir Muhiddin. 2017. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa). Makasar : UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
- Arikunto, S. Jabar, C, 2010, Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Crawford, John. 2000. Ed. 2. Evaluation of Libraries and Information Services. London : Aslib
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineke cipta
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Griffin, P. & Nix, P. 1991. Educational assessment and reporting. Sydney: Harcourt Brace Javanovich, Publisher.
- Hayat. 2018. Kebijakan publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Intrans Publishing : Jawa Timur.
- Hikmat, H. 2004. Participatory Research Appraisal. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisis. Gava Media: Yogyakarta
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi. Aksara: Jakarta.
- Nawawi. 2006. Manajemen kinerja. Gadjah Mada University : Yogyakarta

- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan. Jakarta. Kencana
- Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. P
- Suhandojo. 2001. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan Teknologi. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. BPPT.
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Universitas Malang Press. Malang.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Jurnal :

- Abdurrazzak Naufal dan Yatri Indah Kusumastuti (2010) tentang Evaluasi Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) (Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat). Jurnal Penyuluhan, September 2010 Vol. 6 No. 2
- Ayurestianti (2017) tentang Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan ISSN: 2580-863X (p); 2597-7768 (e); Vol. 1, no. 2 (2017), hal. 385-404
- Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina (2017) tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. ISSN 2549-3922 EISSN 2549-3930 Journal of Regional and Rural Development Planning Juni 2017, 1 (2): 202-216

Undang – Undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

VI. Ucapan Terimakasih

Penulisan Skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Keluarga tercinta, Ibunda (Ucu Sri Kusmawati), Adik-adik tersayang (Liu Richard dan Rinjani Keysa) kemudian yang terhormat: Bapak Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji . Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH, MH selaku Dekan Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji . Bapak Imam Yudhi Prastyana, S.IP, MPA sebagai ketua jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu selama dalam perkuliahan. Bapak Dr. Rumzi Samin, M.Si selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi. Bapak Ramadhani Setiawan, M.Soc, Sc selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi dan banyak membantu menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih kepada Paman (Suparno), Pak Richard. Terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya selama ini. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman-teman KKN Kebangsaan 2016 Desa Pengujan, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam proses perkuliahan. Teman-teman the ruko “krakatau store” (Gery, Kecik, Rona, Rizky, Boboy, Lukman, Aad) yang telah membantu dan memotivasi agar skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Dan teruntuk Indah Usiana yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa dengan tulus dan ikhlas, serta perannya yang begitu berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pihak-pihak selaku informan dalam penelitian ini yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis